

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melalui kedua regulasi ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta keuangannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keuangan daerah meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Semua aspek ini diarahkan agar setiap daerah mampu mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menjadi pedoman teknis penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan APBD. Kedua regulasi ini mengatur bagaimana pemerintah daerah merencanakan, melaksanakan, hingga mempertanggungjawabkan anggarannya secara sistematis.

Prosedur yang digunakan dalam analisis keuangan daerah bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu laporan yang menunjukkan seberapa besar pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang benar-benar terealisasi

dibandingkan dengan yang direncanakan. Laporan inilah yang menjadi dasar utama dalam melakukan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mencerminkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan di daerahnya, yang kemudian dinilai untuk menentukan posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri. Dalam bentuknya yang paling sederhana, anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi dan berisi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, serta aktivitas (Jundia HS & Sarwono AE, 2023)

Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi instrumen utama dalam merumuskan serta merealisasikan kebijakan pembangunan daerah. Struktur APBD yang memuat komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan ringkasan keuangan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi selama periode satu tahun anggaran (Munandar & Agus, 2021)

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Keterkaitan antara realisasi anggaran dan rasio keuangan daerah bersifat saling melengkapi. Realisasi anggaran mencerminkan hasil pelaksanaan keuangan pemerintah daerah dalam satu periode, sedangkan rasio keuangan digunakan untuk menilai kualitas dari pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, realisasi anggaran menjadi dasar penilaian, sementara rasio keuangan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilannya.

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah ada beberapa rasio yang bisa digunakan, diantaranya adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio desentralisasi fiskal. Dalam rangka pengukuran kualitas dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, digunakan analisis menggunakan teknik dan langkah yang tepat sehingga hasil analisis yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam pengambilan kebijakan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Ada beberapa teknik analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, antara lain teknik analisis varians, teknik analisis rasio, teknik analisis pertumbuhan, teknik analisis regresi dan teknik analisis prediksi (Deswira, 2022).

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio keserasian (Deswira, 2022). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

Beberapa penelitian terdahulu telah menelaah kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pendekatan analisis rasio keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2022) menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat cukup tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri.

Kemudian, penelitian yang dilakukan (Marsella et al., 2024) menemukan bahwa meskipun sebagian besar daerah memiliki efektivitas PAD yang cukup tinggi, namun kemandirian fiskalnya tetap rendah karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian pendapatan yang tinggi belum tentu menggambarkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mampu mengelola keuangannya dengan baik selama periode 2022 hingga 2024. Rasio yang digunakan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli

daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman (Melmambessy, 2022).

Dalam konteks Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, rasio ini penting karena bisa menunjukkan sejauh mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar berdampak terhadap kemampuan daerah untuk berdiri secara mandiri. Kemandirian keuangan yang rendah biasanya menandakan bahwa daerah masih kesulitan menggali potensi lokal, belum optimal dalam pemungutan pajak dan retribusi, atau masih belum efisien dalam mengelola aset daerah. Jadi, semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja fiskal dan otonomi keuangannya.

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk melihat seberapa berhasil pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika realisasi PAD sama atau bahkan lebih tinggi dari targetnya, berarti pemerintah daerah efektif dalam menggali sumber pendapatan. Sebaliknya, jika realisasinya jauh di bawah target, berarti kinerja pengelolaan pendapatan masih lemah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan pembentukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan (Labi, 2019).

Rasio derajat desentralisasi fiskal memperlihatkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Rasio desentralisasi fiskal untuk melihat tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan dimana semakin besar kontribusi PAD maka semakin besar kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Oktaviani et al., 2022).

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2022-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022-2024
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	PENDAPATAN DAERAH		BELANJA	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2022	1.724.752.539.448	2.041.006.489.820	1.699.442.539.448	1.988.146.051.790
2023	1.816.933.288.063	1.877.481.113.436	1.812.077.988.063	1.878.056.876.726
2024	2.348.351.900.594	2.258.263.574.239	2.357.602.478.146	2.256.169.748924

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Tabel 1.1 di atas merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Oku Timur Tahun 2022 sampai 2024, terlihat Pendapatan Kabupaten OKU Timur memang mengalami peningkatan setiap tahun, tapi efektivitasnya menunjukkan pola yang tidak stabil. Tahun 2022 dan 2023 realisasi Pendapatan melebihi target, artinya pengelolaan pendapatan efektif, tapi di tahun 2024 realisasinya justru lebih rendah dari anggaran, menandakan efektivitas menurun.

Terlihat pada sisi belanja, dua tahun pertama realisasi belanja melebihi anggaran sehingga belum efisien, namun pada tahun 2024 terjadi perbaikan, karena realisasi belanja justru lebih kecil dari anggaran. Fenomena ini memberikan gambaran nyata tentang seberapa baik kinerja keuangan daerah, dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan APBD ke depannya.

Berdasarkan data yang tersedia di website resmi OKU Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur diproyeksi mengalami penurunan yang cukup

signifikan, yakni sebesar 14% dari tahun anggaran 2021. Dimana pada tahun 2021, APBD Pemkab OKUT sebesar 1.955,59 sedangkan APBD tahun anggaran 2022 diproyeksikan pemerintah daerah OKU Timur sebesar 1.724,75. Ada penurunan sebesar 270,84 atau 13,57% . Meski begitu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKU Timur juga diproyeksikan mengalami tumbuh positif mencapai 1,4% dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, yakni melalui kebijakan strategis yang mengacu pada nilai manfaat (<https://www.metrosumsel.com>).

Selanjutnya Estimasi APBD OKU Timur Tahun Anggaran (TA) 2023 turun 12,69 persen. Estimasi APBD TA 2023 yakni sebesar 1.816,99 atau mengalami penurunan 264,15 atau turun sebesar 12,69 persen dari APBD TA 2022 (<https://www.rmolsumsel.id>).

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Predikat ini menjadi yang ke-13 kalinya diraih secara berturut-turut sejak tahun 2012. Bupati Enos menegaskan bahwa penyampaian Raperda ini merupakan kewajiban konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan tersebut telah dilengkapi hasil audit BPK yang diterima pada 26 Mei 2025.

Dalam penyampiannya, Bupati Lanosin juga mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2,36 triliun, meningkat Rp22 miliar atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp2,34 triliun. Realisasi pendapatan tercatat Rp2,25 triliun atau 95,30 persen dari target, dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp137,32 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta provinsi sebesar Rp2,06 triliun. Belanja daerah dianggarkan Rp2,37 triliun dengan realisasi Rp2,25 triliun atau 94,84 persen. Rinciannya, belanja operasi Rp1,42 triliun, belanja modal Rp449,04 miliar, belanja tak terduga Rp294 juta, dan belanja transfer Rp377,94 miliar (<https://www.rumahberita.id/>).

Berdasarkan data dan tabel 1.1, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan pada pelaksanaan APBD setiap tahunnya. Angka-angka realisasi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya stabil.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dilihat dari hasil analisis rasio keuangan. Melalui analisis ini, peneliti dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah direncanakan (efektivitas), serta seberapa baik daerah mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan (efisiensi). Kombinasi keduanya bisa menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara sehat, yaitu mampu meningkatkan pendapatan sambil menekan pengeluaran nya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah Rasio Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Data Realisasi APBD di OKU Timur Tahun 2022 – 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Rasio Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Data Realisasi APBD di OKU Timur Tahun 2022 – 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dan memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, serta menjadi bahan rujukan akademik dalam penyusunan teori dan model analisis keuangan yang relevan dengan konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai dan mempertimbangkan kebijakan keuangan. Pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pengelolaan APBD selama periode waktu tertentu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil ini menunjukkan seberapa efisien mereka membelanjakan anggaran dan mengumpulkan pendapatan. Dengan menggunakan informasi ini,

Pemerintah dapat memperbaiki strategi pengelolaan keuangan menjadi lebih tepat sasaran dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan data yang jelas tentang keadaan keuangan daerah. Oleh karena itu, masyarakat akan memiliki pemahaman tentang bagaimana APBD dikelola, seberapa mandiri pemerintah daerah secara fiskal, dan apakah anggaran yang digunakan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diharapkan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau pembanding dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. Dengan menggunakan data realisasi APBD, hasil penelitian ini dapat membantu peneliti lain untuk memahami bagaimana penerapan analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan suatu daerah.